

## BAB 4 ANALISIS ALTERNATIF MODEL

Temuan lapangan dikelompokkan kedalam dua kelompok sajian data. Kelompok pertama adalah temuan lapangan mengenai alternatif model tersebut. Kelompok kedua merupakan hasil uji persepsi warga pada alternatif model yang terpilih.

Pada tahap perumusan model alternatif terbaik, ada beberapa catatan penting yang mempengaruhi penggunaan metode analisis AHP. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian metode penelitian, AHP merupakan metode yang mensyaratkan pemahaman yang luas atas subjek penelitian dari para responden yang turut serta. Akan tetapi, di lapangan peneliti berhadapan dengan kesenjangan antara konsep-konsep mengenai model yang ditawarkan dalam proposal penelitian, dengan konsep-konsep atas model-model tersebut yang dipahami oleh responden berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka.

Kesenjangan tersebut berujung pada pendefinisian ulang model-model alternatif pemberdayaan yang ditanyakan kepada responden sebagaimana yang dicantumkan pada sub bab II. Alternatif Model Pemberdayaan, di dalam bab ini. Berdasarkan temuan di lapangan, pusat komunitas yang di maksud dalam rencana penelitian ternyata tidak ditemukan di Palabuhanratu. Meskipun perangkat desa di Kecamatan ada dan terdaftar. Akan tetapi, fungsinya tidak dirasakan oleh masyarakat. Atas dasar itu, maka model pusat komunitas tidak cocok diterapkan di Kecamatan Palabuhanratu. Dengan demikian, hanya ada dua model pemberdayaan yang relevan untuk diterapkan di kecamatan ini, yaitu model koperasi dan model perusahaan induk.

Kedua model tersebut kemudian di uji kembali melalui metode survei yang dilaksanakan di dua desa pantai Kecamatan Palabuhanratu, yakni Desa Palabuhanratu dan Desa Citepus. Survei ini melibatkan 84 responden yang memiliki karakteristik sebagai berikut.

#### 4.1 Karakteristik Responden

Penelitian survey yang diselenggarakan sebanyak dua kali dilakukan di Desa Palabuhanratu dan Desa Citepus. Kedua desa ini masuk dalam kategori desa pantai.

Tabel 4.1. Sebaran Kampung Tempat Tinggal Responden

Desa	Kampung	Jumlah Responden	%
Palabuhanratu	Cemara	12	14.3
Palabuhanratu	Rawa Kalong	12	14.3
Palabuhanratu	Cipatuguran	12	14.3
Palabuhanratu	Sindang Laut	8	9.5
Palabuhanratu	Pangsurlio	12	14.3
Palabuhanratu	Kidang Kencana	6	7.1
Citepus	Cidahon	6	7.1
Citepus	Citepus	16	19.0
	Total	84	100.0

Ada banyak definisi komunitas. Salah satunya adalah kumpulan individu yang terikat karena persamaan profesi. Melalui definisi tersebut, komunitas pesisir dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang terikat dalam basis profesi di sektor perikanan. Mereka juga tinggal dalam satu kesatuan ruang, yaitu desa nelayan. Menurut Kusnadi (2007: 63), desa nelayan adalah desa yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya diperoleh dengan mencari ikan di laut. Profesi nelayan dan produksi dari sektor perikanan laut yang dihasilkan desa nelayan menentukan kehadiran sektor pekerjaan lain, atau institusi ekonomi lokal, seperti industri perkapalan atau pembuatan perahu nelayan, pengolahan hasil tangkap, atau pembuatan alat-alat tangkap, jasa pengangkutan dan perbengkelan, serta toko yang menjual berbagai kebutuhan nelayan, baik kebutuhan operasional atau kebutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, produktifitas sektor perikanan sangat menentukan eksistensi desa tersebut.

Meski demikian, profesi responden tidak tersebar merata di setiap desa. Pada umumnya nelayan buruh berada di sisi tenggara sekitar dermaga, yaitu kampung Cemara, Rawa Kalong dan Cipatuguran. Kampung Cemara dan Rawa Kalong sendiri memang menjadi lokasi yang diperuntukkan bagi para nelayan buruh. Tanah di kampung tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah. Karena itu, banyak terdapat rumah semi permanen yang dibangun sendiri oleh warga.

Tabel 4.2. Sebaran Profesi Responden Berdasarkan Kampung

Nama Desa	pemilik kapal(%)		Nahkoda (%)		Nelayan Buruh (%)		Wirausaha Perikanan (%)		Wirausaha Nonperikanan (%)		Pns Swasta (%)		Lainnya (%)	
Cemara	5	62.5	0		4	21	2	22	1	3	0		0	
Rawa Kalong	1	12.5	1	50	6	31.6	2	22	2	6.9	0		0	
Cipatuguran	2	25	0		3	15.8	0		2	6.9	2	40	3	25
sindang laut	0		0		0		0		7	24.1	0		1	8.3
pangsurlio	0		1	50	1	5.3	3	33	5	17.2	1	20	1	8.3
cidahon	0		0		0		0		2	6.9	1	20	3	25
citepus	0		0		3	15.8	2	22	8	27.6	0		3	25
Kdg Kencana	0		0		2	10.5	0		2	6.9	1	20	1	8.3
Total	8	100	2	100	19	100	9	100	29	100	5	100	12	100

Kampung Sindang Laut, Pangsurlio dan Cidahon adalah kampung-kampung yang jauh lebih baik kondisinya. Meskipun kampung ini tergolong pemukiman yang padat, dengan rumah yang saling berdempetan dan tidak beraturan, tetapi gang yang dilalui jalan setapak sudah disemen. Rumah-rumah yang dibangun disini juga menggunakan tembok dari batu bata dan beralaskan tegel. Di kampung ini, warga yang berprofesi di sektor perikanan tetap ada, tetapi tidak semuanya menjadi nelayan buruh. Sebagian membuka usaha sendiri, baik sebagai pedagang ikan, atau warung kelontong. Warga yang berprofesi sebagai pegawai juga ada.

Kelurahan Citepus menjadi lokasi tempat berdirinya berbagai hotel. Karena itu, tidak semua warga yang berada di desa ini bekerja di sektor perikanan. Selain itu, di desa ini juga terdapat perkebunan kelapa dan areal sawah. Penduduk yang menjadi responden dalam survei ini sebagian bekerja di sektor pertanian dengan profesi sebagai petani.

Tabel 4.3. Jenis Kelamin Responden

Jender	Jumlah	(%)
Laki-laki	56	66.7
Perempuan	28	33.3
Total	84	100.0

Penelitian ini tidak mengantisipasi aspek jender. Karena itu, sebaran kuesioner berdasarkan jenis kelamin tidak merata. Akan tetapi, dalam praktek, perbedaan jender memiliki angka yang cukup berarti, sebagaimana dicantumkan dalam tabel diatas.

Sebagian besar responden berpendidikan rendah. Mayoritas responden hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD dan SMP. Dan hampir semua responden perempuan memiliki tingkat pendidikan sampai tingkat SD saja.

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan tingkat pendidikan. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebenarnya tidak dirancang untuk membedakan karakteristik responden berdasarkan jender. Meski demikian, perbedaan diantara responden laki-laki dengan responden perempuan cukup besar, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4. Sebaran Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jender

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Total (%)
Tidak Sekolah	7.1	10.7	8.3
SD	51.8	46.4	50
SMP	7.1	17.8	10.7
SMU	28.6	21.4	26.2
D2/D3	1.8	-	1.2
S1	3.6	3.6	3.6

#### 4.2 Deskripsi Kriteria Model dan Alternatif Model

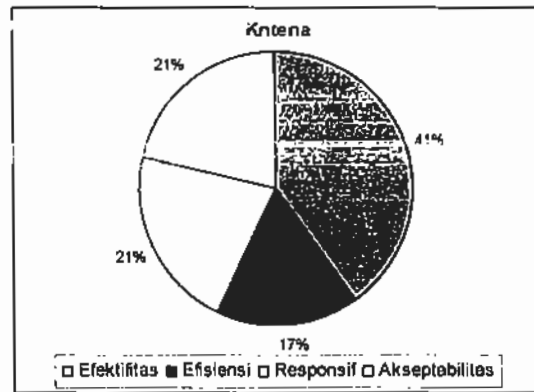
Kecamatan Palabuhanratu sudah pernah menerima dana program PEMP pada tahun 2001 hingga 2003. Pada tahun 2003, peserta PEMP berasal dari dua desa, yaitu desa Tonjong dengan peserta 68 orang, dan desa Palabuhanratu dengan peserta 18 orang. Berdasarkan data tersebut, maka program pemberdayaan yang akan dijalankan melalui salah satu dari tiga alternatif tersebut akan melibatkan sekitar 80 hingga 100 orang.

Tabel 4.5. Alternatif-alternatif Model Pemberdayaan

<b>Keterangan Konsep</b>	<b>Koperasi Perikanan</b>	<b>Pusat Komunitas</b>	<b>Inti Plasma</b>
Pelaksana Program	Jajaran Pemerintahan	Lembaga Swadaya Masyarakat	Pengusaha Perikanan atau Bakul
Sasaran Program	Keluarga Perikanan	Keluarga Perikanan	Nelayan dan Pembudidaya
Sumber Dana	APBN/APBD	Swadana Masyarakat	Pengusaha/Bank
Strategi Pemberdayaan	Koperasi Simpan-Pinjam	Bantuan Modal dan Pelatihan	Bantuan Asset (modal dan alat tangkap) dan Pemasaran
Jumlah Peserta	80-100 orang	80-100 orang	80-100 orang

#### 4.2.1 Deskripsi Kriteria Model

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 10 responden ahli, diperoleh data-data yang menunjukkan pilihan prioritas responden atas kriteria dan alternatif dari model pemberdayaan yang dapat diterapkan di Kecamatan Palabuhanratu. Dari empat kriteria sebuah model pemberdayaan yang ditanyakan kepada responden, secara berurut responden menentukan prioritas pertama adalah efektifitas, yang kemudian diikuti oleh akseptabilitas, responsif, dan efisiensi.

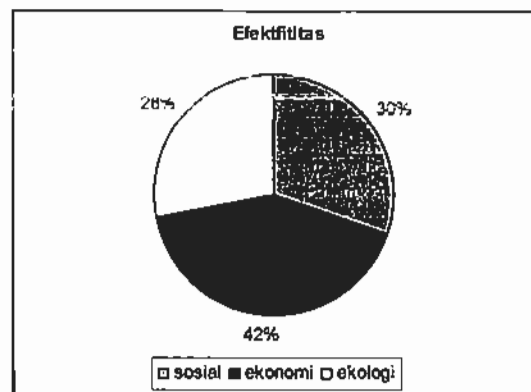


Gambar. 4.1. Kriteria Umum Model Pemberdayaan

Posisi kriteria efektifitas program serta akseptabilitas program dibandingkan dengan responsif dan efisiensi, menunjukkan bahwa para responden berpendapat pengetahuan serta peran aktif masyarakat dalam merumuskan dan menentukan arah program tidak begitu penting. Pernyataan ini akan semakin tergambar ketika memperdalam analisis pada masing-masing subkriteria.

Elaborasi pada kriteria efektifitas menunjukkan bahwa manfaat ekonomi lebih diharapkan ketimbang manfaat sosial dan lingkungan. Ini menunjukkan peningkatan pendapatan peserta program lebih penting ketimbang partisipasi mereka dalam perencanaan program. Tampaknya para responden yang berpengalaman dengan program pemberdayaan di Palabuhanratu masih belum menaruh kepercayaan pada warga untuk menentukan keputusannya sendiri. Terdapat kecenderungan komunitas pesisir di Palabuhanratu sendiri cenderung individualistik.

Sikap individualistik ini bisa dialatarbelakangi oleh dua alasan. *Pertama*, profesi mereka menghabiskan sebagian besar waktu dalam sehari, terutama warga yang berprofesi sebagai nelayan. Sehingga, waktu mereka untuk bersosialisasi sangat terbatas. *Kedua*, komunitas pesisir cenderung egois. Tekanan ekonomi yang melilit mereka membuat mereka selalu mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan, meskipun merugikan orang lain. Karena itulah semua bank dan pengurus koperasi di Palabuhanratu tidak percaya bahwa warga yang berprofesi sebagai nelayan memiliki itikad untuk mengembalikan kredit yang di berikan pada mereka.

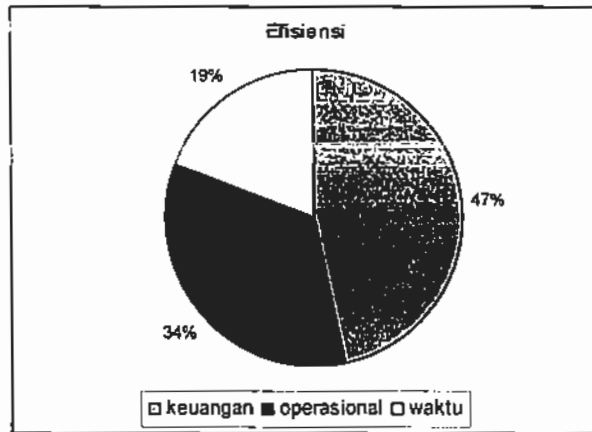


Gambar 4.2. Sub Kriteria Efektivitas

Fakta yang ditampilkan pada tabel di atas tentu masih menunjukkan adanya distorsi strategi pemberdayaan. Salah satu responden berargumen bahwa warga lebih membutuhkan modal ketimbang bantuan-bantuan lain. Akan tetapi, bila mereka tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, kesertaan mereka dalam kegiatan bisa digolongkan dalam mobilisasi, bukan pemberdayaan.

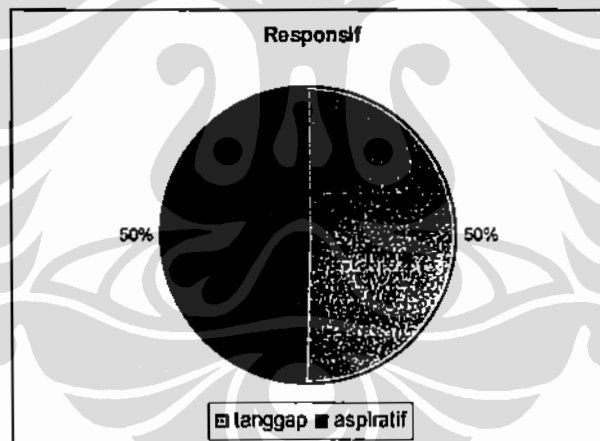
Walaupun prioritas manfaat lingkungan menempati posisi terakhir, tetapi porsi tidak begitu rendah. Porsi tersebut tampaknya tidak terlepas dari ketertiban penggunaan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan. Perkembangan ini merupakan salah satu keberhasilan pengelola pelabuhan PPNP dalam mendisiplinkan kelompok-kelompok nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di sekitar pelabuhan.

Dari sisi efisiensi program, hasilnya pun konsisten dengan manfaat program. Efisiensi keuangan lebih diprioritaskan ketimbang efisiensi operasional dan waktu. Temuan ini bisa dianggap wajar, sebab modal keuangan program memang menjadi salah satu modal terpenting dalam setiap program pemberdayaan.



Gambar. 4.3. Sub Kriteria Efisiensi

Kemudahan dalam pelaksanaan program juga lebih diutamakan daripada manfaat program untuk dinikmati oleh pesertanya. Kemudahan pelaksanaan ini berlaku bagi pelaksana maupun bagi peserta sendiri.

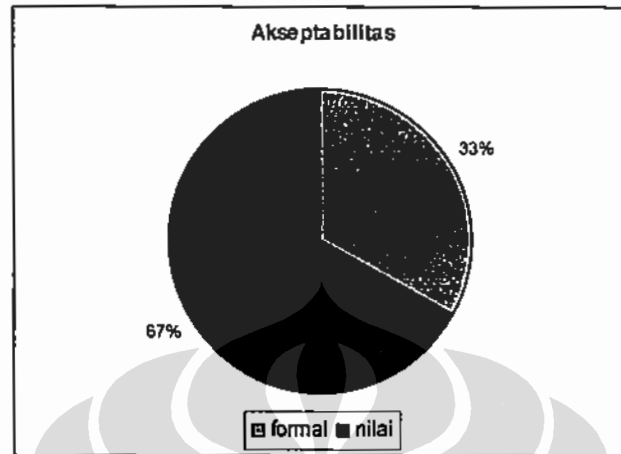


Gambar 4 .4. Sub Kriteria Responsif

Elaborasi kriteria responsif menunjukkan pendapat responden yang berimbang antara kesesuaian program dengan kebutuhan dibandingkan dengan kemampuan program menampung aspirasi. Tampaknya, responden menganggap keduanya sama-sama penting dan saling berhubungan antara satu-sama lain. Bila dibandingkan dengan pendapat responden tentang manfaat sosial, yang meliputi



kesempatan warga untuk partisipasi aktif, menunjukkan bahwa pelaksana program merasa yakin bahwa setiap program yang diterapkan sudah memenuhi kebutuhan.



Gambar 5.5. Sub Kriteria Akseptabilitas

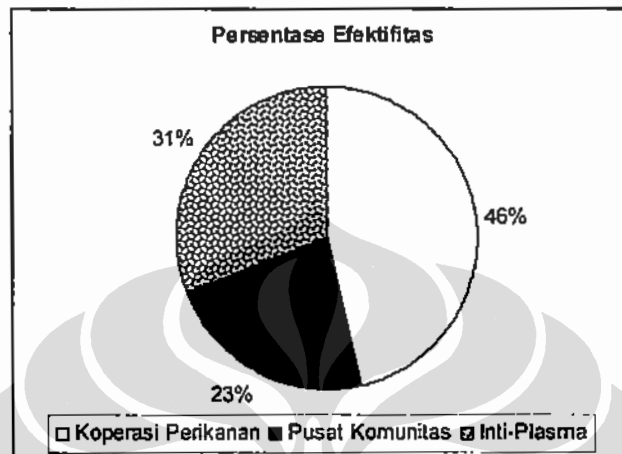
Elaborasi kriteria akseptabilitas menunjukkan fakta yang menarik. Menurut responden, kesesuaian program atau model pemberdayaan dengan nilai dan kebiasaan warga lebih penting daripada kesesuaian program dengan tata aturan formal yang berlaku di Palabuhanratu. Ini menunjukkan keberhasilan model pemberdayaan ditentukan oleh penerimaan warga.

Bila disimpulkan berdasarkan kriteria dan subkriteria yang ada, model pemberdayaan yang memiliki peluang keberhasilan paling baik, menurut responden ahli, adalah model yang memperhatikan kriteria-kriteria utama sebagai berikut:

1. Mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
2. Sesuai dengan nilai dan kebiasaan komunitas pesisir di Palabuhanratu, serta sesuai dengan kebutuhan warga.
3. Mampu menangkap aspirasi warga
4. Efisien dalam pengalokasian dana program
5. Strategi pemberdayaan yang paling diharapkan adalah bantuan keuangan berupa modal usaha.

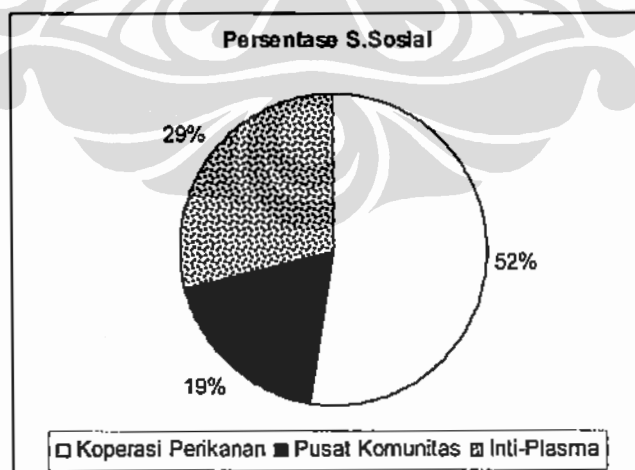
#### 4.2.2 Deskripsi Alternatif Model

Setelah responden memberikan bobot pada setiap alternatif dan sub alternatif, mereka kemudian memberikan prioritas mereka atas alternatif model pemberdayaan yang ditawarkan. Penyajian data akan dilakukan dari urutan prioritas berdasarkan subkriteria, kriteria, hingga prioritas model keseluruhan.



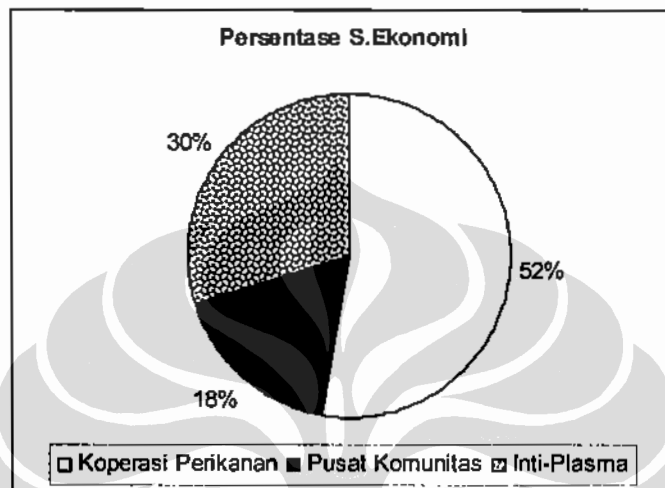
Gambar IV.6 Persentase Model Pemberdayaan Subkriteria Efektivitas

Gambar di atas menunjukkan koperasi perikanan lebih efektif atau lebih mampu memenuhi kebutuhan warga dibandingkan dengan kriteria lain. Pada urutan berikutnya adalah keberadaan persahaan yang bisa membina usaha komunitas. Setelah itu, barulah upaya memaksimalkan fungsi pusat komunitas.



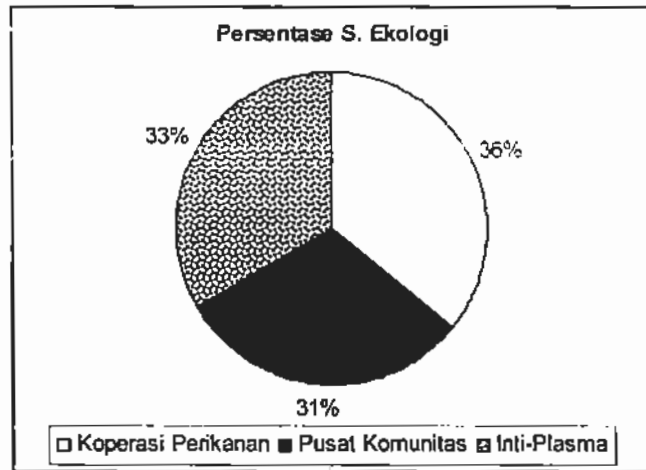
Gambar 4.7 Persentase Model Pmberdayaan Sub Kriteria Sosial

Setelah memberikan bobot prioritas pada kriteria dan subkriteria, responden kemudian memberikan penilaian model terbaik dari tiga alternatif model yang ada. Dari sisi efektifitas sosial program atau dampak sosial model, ternyata responden memilih koperasi dengan porsi 52% sementara urutan kedua adalah Inti-plasma (29%) lalu ketiga pusat komunitas (19%).



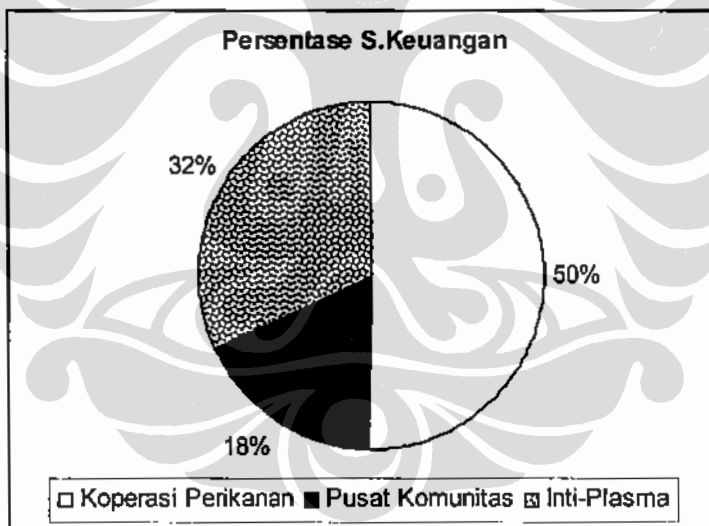
Gambar 4.8: Persentase Model Pemberdayaan Sub Kriteria Ekonomi

Dari sisi manfaat ekonomi model pemberdayaan, model Koperasi (53%) juga dianggap lebih unggul karena memberikan bantuan modal ekonomi. Sementara urutan kedua dan ketiga adalah inti-plasma (30%) dan pusat komunitas (17%). Temuan ini didasarkan pada keyakinan responden bahwa bantuan modal sangat dibutuhkan. Dan pengguliran bantuan tersebut paling efektif dilakukan melalui perantara koperasi.



Gambar 4.9: Persentase Model Pemberdayaan Sub Kriteria Ekologi

Manfaat lingkungan yang lebih baik dari model koperasi (36%) Menempatkannya pada prioritas pertama dengan prioritas kedua dan ketiga adalah inti plasma (31%) dan pusat komunitas (33%).

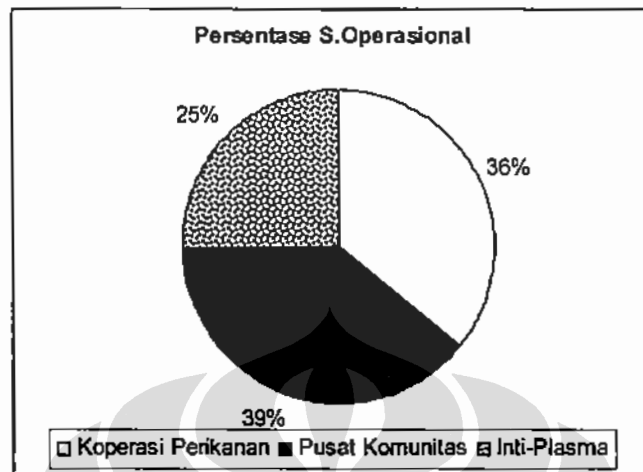


Gambar IV.10: Persentase Model Pemberdayaan Sub Kriteria Keuangan

Subkriteria efisiensi terbagi menjadi tiga. Pada subkriteria efisiensi keuangan (50%), koperasi lebih unggul dari inti-plasma (32%) dan pusat komunitas (18%) ditempatkan pada prioritas pertama.

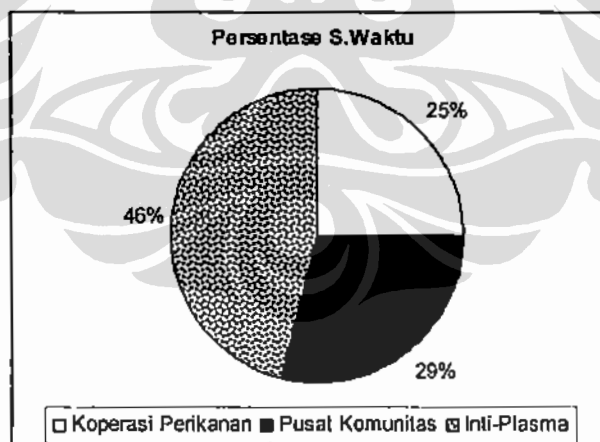
Meski demikian, pendapat responden sebenarnya bertolak belakang dengan persepsi warga. Sebab menurut pengalaman warga, penyaluran bantuan

maupun program yang diperuntukkan bagi warga selama ini justru rawan penyelewengan.



Gambar 4.11: Persentase Model Pemberdayaan Sub Kriteria Operasional

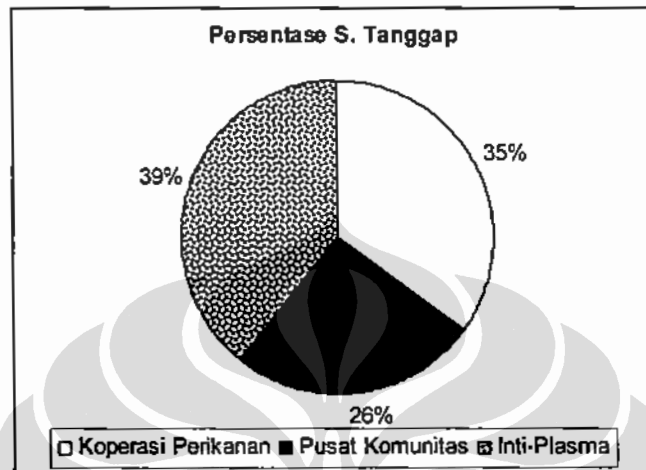
Subkriteria efisiensi operasional menjadi keunggulan pusat komunitas (39%) dibandingkan pusat koperasi (36%) dan inti-plasma (25%) yang berada di posisi kedua dan ketiga. Menurut responden, koperasi lebih mudah dijalankan baik oleh pengelola maupun masyarakat.



Gambar 4.12: Persentase Model Pemberdayaan Sub Kriteria Waktu

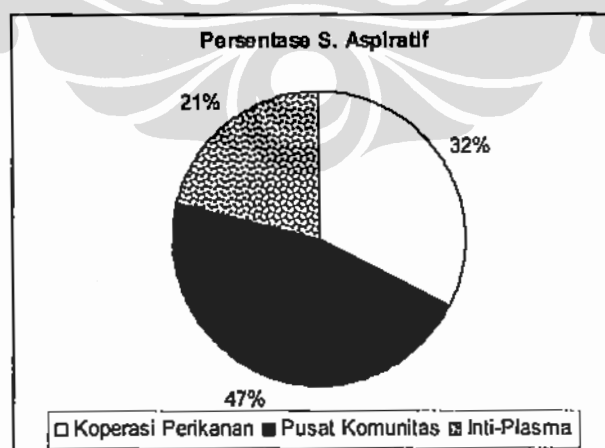
Sementara subkriteria efisiensi waktu, atau kecepatan kelompok sasaran untuk merasakan manfaat dari model pemberdayaan menjadi kekuatan pusat inti-plasma (46%) dibandingkan dengan pusat komunitas (29%), dan koperasi (15%).

Kelebihan model inti-plasma adalah kemampuannya membantu pemasaran hasil tangkap nelayan. Inti-plasma juga bisa memberikan rantai ekonomi yang menguntungkan bagi komunitas. Karena itu, manfaat model ini lebih terukur bagi responden.



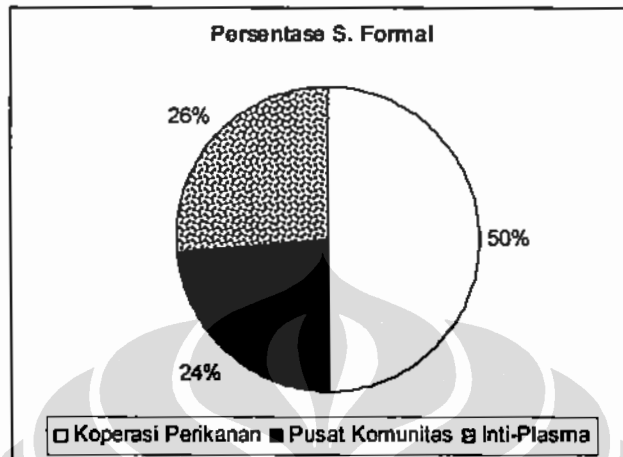
Gambar 4.13: Persentase Model Pemberdayaan Sub Kriteria Tanggap

Pada subkriteria responsif tanggap, model inti-plasma (39%) menjadi model yang paling baik. Subkriteria ini menunjukkan bahwa inti plasma sebenarnya lebih mampu menyediakan layanan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan urutan kedua dan ketiga, koperasi (35%) serta pusat komunitas (26%).



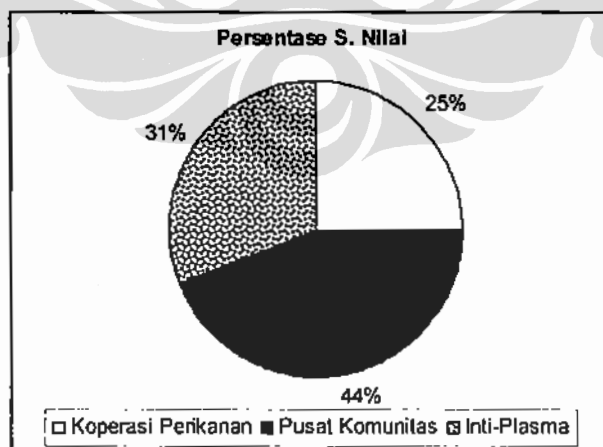
Gambar 4.14: Persentase Model Pemberdayaan Sub Kriteria Aspiratif

Model pusat komunitas (47%) menjadi yang terbaik pada subkriteria aspiratif program yang kedua, yaitu kesesuaian model dengan nilai dan kebiasaan masyarakat. Posisinya kedua dan ketiga ditempati model koperasi perikanan (32%) dan inti-plasma (21%).



Gambar 4.15: Persentase Model Pemberdayaan Sub Kriteria Formal

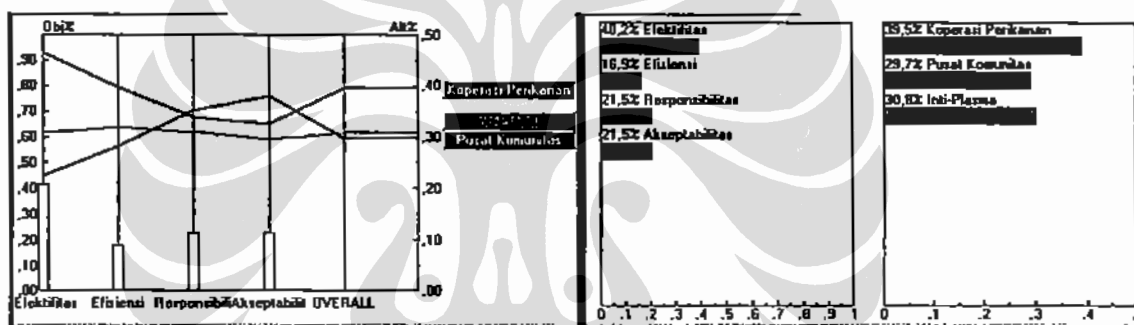
Pada subkriteria akseptabilitas, yang menjadi kriteria terakhir, model koperasi, pusat komunitas dan inti-plasma cukup berimbang. Pada subkriteria kesesuaian dengan aspek hukum formal, model koperasi (50%) menempati posisi pertama. Subkriteria ini menunjukkan bahwa koperasi lebih sesuai dan mampu memenuhi aspek legal-formal, seperti perundang-undangan maupun peraturan pemerintah di pusat dan daerah. Posisi kedua dan ketiga diisi oleh inti-plasma (26%) serta pusat komunitas (24%).



Gambar 4.16: Persentase Model Pemberdayaan Sub Kriteria Nilai

Model pusat komunitas (44%) kembali menjadi yang terbaik pada subkriteria akseptabilitas program yang kedua, yaitu kesesuaian model dengan nilai dan kebiasaan masyarakat. Posisinya kedua dan ketiga ditempati oleh koperasi inti-plasma (31%) dan koperasi perikanan (25%)

Secara keseluruhan, model Koperasi Perikanan menjadi prioritas utama untuk diterapkan di Palabuhanratu. Pada urutan kedua serta ketiga adalah inti-plasma dan pusat komunitas. Keunggulan koperasi dibanding dua alternatif lain disebabkan karena kemampuannya yang dianggap lebih baik dalam memberikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan lebih baik. Meskipun koperasi tidak lebih baik dibanding inti-plasma dan pusat komunitas, bila dilihat pada kesesuaian dengan kebutuhan dan sisi penerimaan komunitas.



Gambar 4. 17. Grafik Prioritas Alternatif Model Pemberdayaan Pilihan Responden

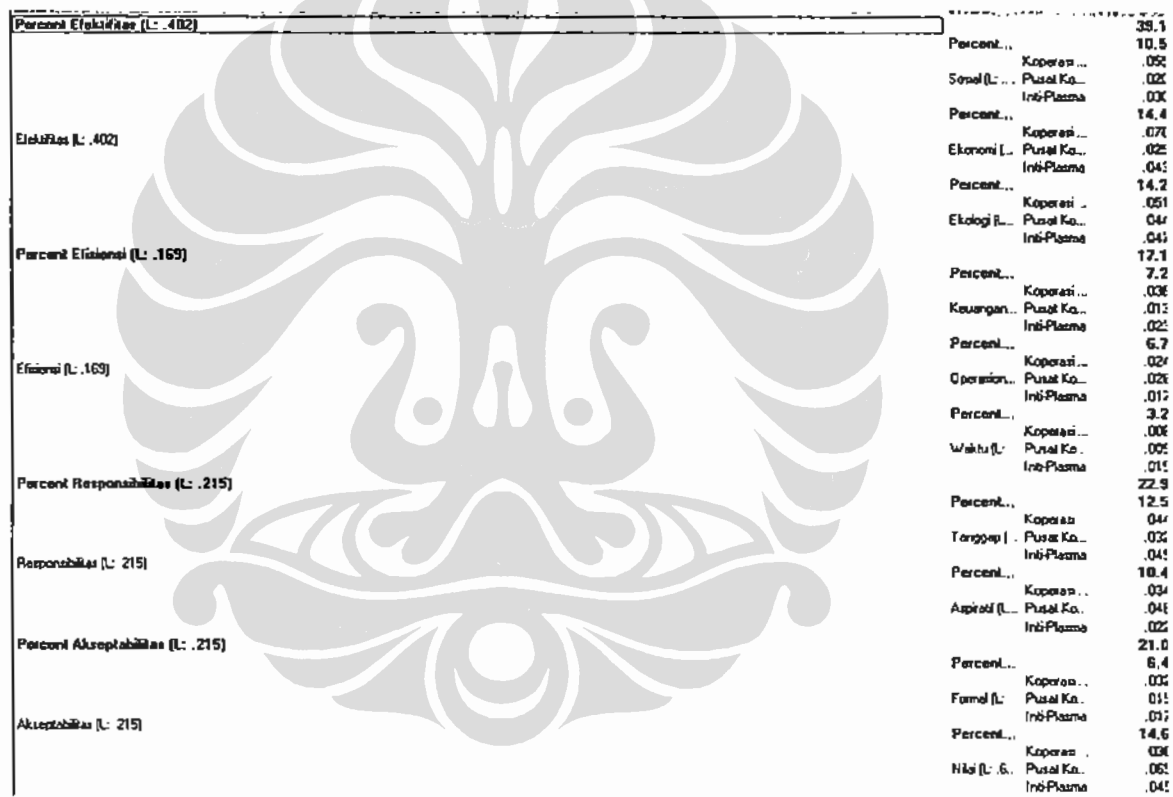
Model Koperasi Perikanan memang hanya unggul pada kriteria efektifitas dan efisiensi. Akan tetapi, karena bobot kriteria efektifitas sangat besar, secara keseluruhan model ini tetap lebih berpeluang untuk berhasil. Sebaliknya, pusat komunitas, meski unggul dalam kemampuan memenuhi kebutuhan komunitas dan memiliki penerimaan yang paling tinggi dibanding dua alternatif lain, tetap berada di posisi ketiga. Inti plasma berada di posisi kedua pada kriteria efektifitas dan efisiensi, dan secara keseluruhan pun berada di posisi kedua.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa kriteria penerimaan program serta kemampuan program menangkap aspirasi komunitas tidak menjadi penentu



program pemberdayaan komunitas di Palabuhanratu. Hasil ini cukup mengejutkan, sebab pada umumnya teori-teori pemberdayaan, terutama teori kritis, justru lebih mengedepankan proses yang partisipatif sebagai penentu keberhasilan program.

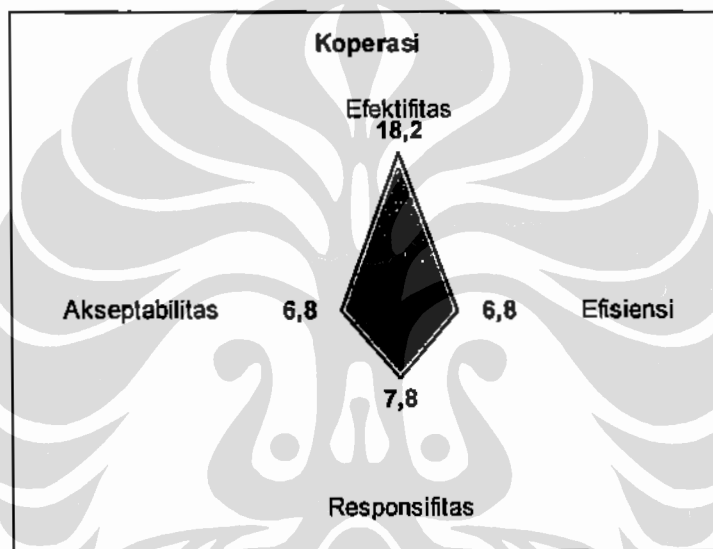
Hasil analisis ini bisa jadi dipengaruhi oleh karakteristik responden yang didominasi oleh kalangan birokrasi, dan pengelola koperasi, yang memang lebih terbiasa dengan pola mobilisasi ketimbang partisipasi. Meski demikian, karena mereka adalah responden yang memang memiliki pengalaman lapangan sebagai pengelola program pemberdayaan, pendapat mereka menjadi catatan penting dalam perumusan model pemberdayaan masyarakat pesisir selanjutnya.



Gambar 4. 18. Total Skor Analisis AHP Terhadap Kriteria Subkriteria dan Model Terbaik

#### 4.2.2.1 Koperasi

Koperasi adalah model pemberdayaan yang memiliki skor preferensi paling tinggi dibandingkan ketiga alternatif model lainnya. Selain itu, koperasi merupakan model pemberdayaan yang paling umum diterapkan, terutama di Kecamatan Palabuhanratu sendiri. Berdasarkan pendapat responden ahli, kekuatan model ini terletak pada efektifitasnya sebagai sebuah model pemberdayaan. Model koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan sekaligus. Atas pertimbangan itulah, responden ahli menempatkannya sebagai model terbaik.



Gambar 4.19. Potensi Penerapan Alternatif Koperasi

Berdasarkan hasil survey kepada 55 responden yang tinggal di Desa Palabuhanratu, ada beberapa kriteria yang menentukan persepsi mereka pada model ini. *Pertama*, adalah jenis kegiatannya. Mayoritas responden berharap agar koperasi memberikan bantuan modal kepada masyarakat. *Kedua*, responden memberikan perhatian khusus pada pelayanan koperasi. Menurut responden, selama ini bantuan yang disalurkan melalui koperasi rawan penyelewengan, atau salah sasaran. Untuk mengatasi kemungkinan terburuk, maka pengelolaan model ini sebaiknya dilakukan atas dasar prinsip kemitraan antara pemerintah dengan

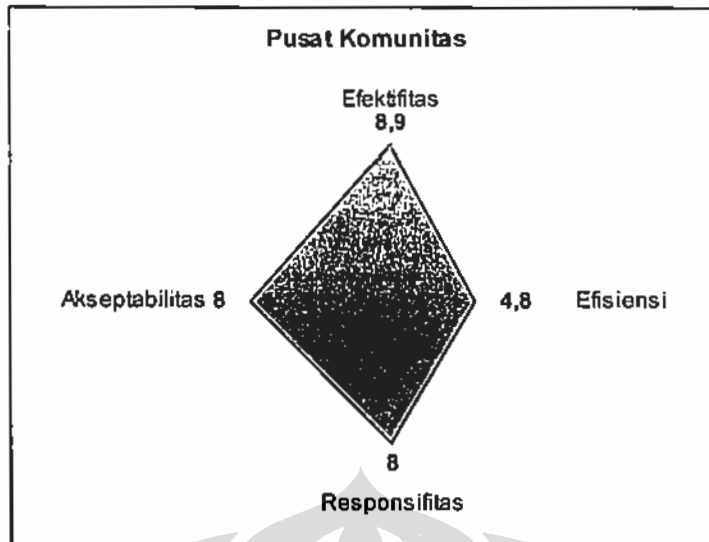
warga. Karena itu, warga lokal dilibatkan sebagai salah satu bagian dari pengelola koperasi.

*Ketiga*, koperasi membutuhkan sekretariat yang memadai. Sebab, aktifitas penyaluran dan pengembalian bantuan modal yang diberikan dilaksanakan di kantor koperasi. *Keempat*, besarnya modal yang digulirkan harus sebanding dengan kebutuhan usaha komunitas. Sebab, berdasarkan pengalaman, pinjaman yang terlalu kecil hanya akan digunakan oleh pemanfaat program untuk kepentingan konsumtif saja.

Keempat kriteria tersebut merupakan harapan dari warga. Pelaksanaan keempat kriteria tadi akan memperbesar peluang keberhasilan model pemberdayaan.

#### 4.2.2.2 Pusat Komunitas

Ada perbedaan persepsi antara pusat komunitas yang dimaksud dalam rancangan penelitian dengan pusat komunitas yang dipahami oleh responden. Apabila dalam rancangan penelitian pusat komunitas yang dimaksud adalah institusi lokal yang menjadi forum warga dan menjalankan fungsi sebagai katalisator aspirasi warga. Pemahaman yang berbeda diutarakan oleh sebagian besar responden, yang menganggap pusat komunitas adalah kelompok-kelompok nelayan yang saling bekerjasama melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Data yang terkumpul akhirnya menggunakan definisi pusat komunitas menurut versi responden.



Gambar 4.20. Potensi Penerapan Alternatif Pusat Komunitas

Berdasarkan pendapat responden, model pusat komunitas memiliki tingkat penerimaan dan daya tanggap yang relatif baik. Akan tetapi, skor efisiensinya sangat rendah. Begitu pula dengan efektifitasnya sebagai sebuah model pemberdayaan. Sorotan utama dari model ini tentu dialamatkan pada tingkat efisiensinya yang sangat rendah.

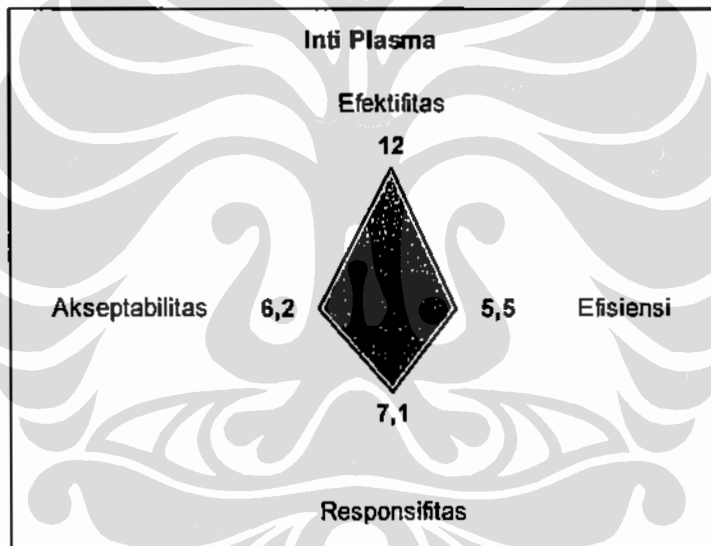
Hasil survey kepada 55 responden juga memiliki kesimpulan yang konsisten dengan analisis AHP diatas. Menurut warga perangkat desa, seperti ketua-ketua RW, sangat sering memanipulasi bantuan yang seharusnya diperuntukkan untuk warga. Oleh karena itu, warga menjadi skeptis pada model bantuan yang disalurkan melalui pusat komunitas. Meskipun mereka tidak bermaksud untuk menolak atau tidak membutuhkan bantuan tersebut.

Walaupun saat penelitian dilaksanakan kinerja perangkat desa masih memprihatinkan, tetap ada peluang untuk memperbaikinya. Pelibatan pihak ketiga dari masyarakat sipil, seperti konsultan atau pekerja sosial, bisa menjadi penggerak perbaikan tersebut. Peluang ini semakin terbuka bila melihat kinerja perangkat desa bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan konsultan independen dalam pembangunan MCK sebagai bagian dari program P2KP tahun 2008 di beberapa RW dari seluruh kelurahan di Palabuhanratu. Berdasarkan pengamatan dalam wawancara sambil lalu dengan warga, mereka cukup antusias

dengan pembangunan fasilitas umum seperti MCK dan perapihan jalan sepanjang gang tempat tinggal mereka.

#### 4.2.2.3 Inti Plasma

Model ini merupakan alternatif kedua dalam urutan prioritas alternatif model pemberdayaan. Sorotan paling penting bagi alternatif model ini terletak di sisi penerimaan komunitas. Berdasarkan hasil survey persepsi warga atas model pemberdayaan –yang akan ditampilkan di bagian akhir dari bab ini, model inti-plasma memang diterima oleh komunitas strata bawah, akan tetapi penerimaan komunitas strata di atasnya justru lebih kecil. Hal ini bisa terjadi karena model inti-plasma memang akan memotong rantai ekonomi yang selama ini mendominasi dinamika sosial-ekonomi komunitas pesisir, yaitu pemilik modal.



Gambar 4.21. Potensi Penerapan Alternatif Inti Plasma

Sebagai antisipasi atas tantangan bagi model ini, ada beberapa kriteria penerapan yang harus diperhatikan. *Pertama*, pengelolaan model ini harus melibatkan pemerintah daerah, pengusaha serta komunitas pesisir. *Kedua*, kegiatan pemberdayaan model ini dilakukan dengan berbasis pada kegiatan ekonomi, yaitu transaksi jual-beli hasil tangkap. Nelayan akan memperoleh keuntungan ganda, yakni dari selisih jual-beli dan dari pembagian keuntungan (deviden) atas perusahaan berdasarkan porsi kepemilikan saham. *Ketiga*,

mengingat kemungkinan resistensi yang ada, peran pemerintah lokal sangat dibutuhkan untuk menjamin setiap kelompok masyarakat bisa berkontribusi dan mendapat manfaat dari model ini dengan sewajarnya.

### 4.3 Persepsi Warga Terhadap Kriteria Model Pemberdayaan dan Alternatif Model Pemberdayaan

#### 4.3.1 Persepsi Warga atas Kriteria Model Pemberdayaan

Kriteria-kriteria model yang ditanyakan dalam kuesioner adalah sebagian kriteria yang memiliki skor menonjol pada analisis AHP dan survei sebelumnya. Survei ini bertujuan untuk melihat persepsi responden mengenai kriteria-kriteria tersebut dalam mengukur sebuah model pemberdayaan.

Tabel 4.6. Persepsi Responden atas Kriteria Model Pemberdayaan

Kriteria Model	Kategori Persepsi					Total Skor
	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Biasa Saja	Setuju	
Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan	-	22.6%	3.6%	15.5%	58.3%	336
Program Menambah Pendapatan	-	28.6%	-	7.1%	64.3%	354
Program Membantu Pemasaran	-	10.7%	3.6%	20.2%	65.5%	322
Program Memenuhi Permintaan Masyarakat	-	19%	2.4%	8.3%	70.2%	341
Program Sesuai Adat dan Tradisi	1.2%	10.7%	1.2%	31%	56%	314

Berdasarkan jawaban-jawaban responden, umumnya semua responden setuju dengan kelima kriteria tersebut. Kriteria yang paling diharapkan adalah kemampuan model pemberdayaan menambah pendapatan nelayan, serta kesesuaian program dengan keinginan warga. Ini menunjukkan harapan warga agar dilibatkan dalam pengambilan keputusan tidak lebih prioritas dari manfaat yang mereka peroleh. Tampaknya, para responden lebih berorientasi pada hasil, bukan pada bagaimana proses pemberdayaan dalam model tersebut berjalan.

#### 4.3.2 Persepsi Warga Terhadap Koperasi

Keunggulan Koperasi Perikanan atas rekomendasi responden-responden ahli masih perlu di bandingkan dengan persepsi warga, terutama komunitas pesisir di wilayah tersebut. Langkah ini perlu dilakukan, sebab model pemberdayaan masyarakat pesisir melalui koperasi sudah pernah diterapkan dan bahkan masih berjalan di kecamatan ini. Untuk itu, disusunlah daftar pertanyaan yang kemudian di sebarakan pada 55 responden di desa yang berstatus daerah pantai, yaitu Palabuhanratu.

Tabel 4.7. Silang Partisipasi Koperasi – Pengetahuan Keberadaan Koperasi

Partisipasi Koperasi	Keberadaan Koperasi			Total
	Tidak Tahu	Tidak Ada	Ada	
Tidak	0	0	80,48 %	80, 48 %
Ya	0	0	19,52 %	19, 52 %
Total	0 %	0 %	100 %	100 %

Tabel silang di atas menunjukkan bahwa sebagian besar warga yang mengetahui keberadaan koperasi, memilih untuk tidak mengikuti kegiatan koperasi (80.5%). Model ini berlaku di populasi pada tingkat kepercayaan 10%, sebagaimana yang tertera pada tabel uji *chi-square* di bawah ini.

Tabel 4.8. Uji Chi-Square Terhadap Partisipasi Koperasi – Pengetahuan Keberadaan Koperasi

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	55.000 <sup>a</sup>	6	.000
Likelihood Ratio	62.400	6	.000
Linear-by-Linear Association	2.130	1	.144
N of Valid Cases	55		

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .15.

Baik warga yang ikut maupun yang tidak mengikuti kegiatan koperasi memiliki pandangan masing-masing mengenai kendala yang dihadapi warga ketika mengikuti kegiatan koperasi. Secara umum ada dua kendala utama yang menjadi hambatan, yaitu keraguan mereka atas integritas para pengelola koperasi dan seringnya program-program tersebut diperuntukkan pada orang yang sebenarnya tidak menjadi sasaran program. Warga menganggapnya sebagai bantuan yang salah sasaran.

Tabel 4.9. Kendala dalam Program

Alasan Tidak Ikut Serta Program	Persentase
Tidak Jawab	16,4 %
Penyelewengan	27,3 %
Informasi Kurang	12,7 %
Salah Sasaran	18,2 %
Takut Macet	10,9 %
Lainnya	14,5 %

Bagi mereka yang tidak mengikuti kegiatan koperasi, alasan utama yang melatarbelakangi pendirian mereka adalah karena curiga akan adanya penyelewengan program. Sementara yang menjadi kendala bagi peserta kegiatan koperasi adalah kekhawatiran tidak mampu melunasi kredit bantuan dari koperasi.

Tabel 4.10. Tabel Silang Partisipasi Koperasi - Kendala dalam Program

Partisipasi Koperasi	Kendala dalam Program						Total
	Tidak Menjawab	Penyelewengan	Informasi Kurang	Salah Sasaran	Takut Macet	Lainnya	
Tidak	12.20 %	24.39 %	9.76 %	19.51 %	4.88	9.76	80.49
Ya	2.44 %	4.88 %	2.44 %	0.00 %	7.32	2.44	19.51
Total	14.63 %	29.27 %	12.20 %	19.51 %	12.20 %	12.20 %	100 %

Lemahnya pelayanan koperasi tampaknya telah menjadi pengetahuan umum di kalangan komunitas pesisir Palabuhanratu. Tabel di atas memberikan informasi bahwa lemahnya kinerja koperasi sudah diketahui oleh mereka yang tidak ikut kegiatan koperasi sekalipun. Kendala-kendala yang membayangi warga di Desa Palabuhanratu, pada akhirnya mempengaruhi citra koperasi di hadapan



mereka. Responden yang mengetahui keberadaan koperasi sebagian besar merasa tidak puas dengan kinerja koperasi.

Tabel 4.11. Tabel Silang Pendapat tentang Koperasi - Partisipasi Koperasi

Pendapat tentang Koperasi	Partisipasi Koperasi		Total
	Tidak	Ya	
Tidak Puas	39.02 %	12.20 %	51.22 %
Biasa Saja	39.02 %	7.32 %	46.34 %
Puas	2.44 %	0.00 %	2.44 %
<b>Total</b>	<b>80.49 %</b>	<b>19.51 %</b>	<b>100.00 %</b>

Berdasarkan analisis tabel silang di atas, mayoritas responden yang ikut maupun yang tidak ikut kegiatan koperasi merasa tidak puas dengan kinerja koperasi. Latar belakang dari sikap tersebut karena pengalaman negatif atau informasi negatif yang diterima responden atas kinerja koperasi. Informasi-informasi tersebut berupa kendala yang mereka alami atau mereka dengar tentang koperasi. Hubungan asosiasi antara variabel kesertaan dalam kegiatan koperasi dengan pendapat mereka tentang koperasi terbukti di taraf nyata secara statistik melalui uji *chi square* yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.12. Uji Chi-Square Pendapat tentang Koperasi - Partisipasi Koperasi

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	55,881(a)	6	,000
Likelihood Ratio	63,246	6	,000
Linear-by-Linear Association	53,989	1	,000
N of Valid Cases	55		

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15.

Hasil uji statistik lanjutan pada hubungan asosiasi antara kesertaan dalam kegiatan koperasi dengan pendapat responden tentang koperasi memiliki nilai yang cukup baik. Tabel-tabel dibawah ini menunjukkan hubungan yang simetris dengan kekuatan hubungan sedang antara kedua variabel tersebut, yaitu nilai value Kendall's tau-b sebesar 0.580.

Tabel 4.13. Uji Kekuatan Hubungan Pendapat tentang Koperasi - Partisipasi Koperasi

			Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal	Somers'	Symmetric	,577	,102	5,019	,000
by	d	Pendapat				
Ordinal		tentang koperasi	,637	,114	5,019	,000
		Dependent				
		Partisipasi				
		koperasi	,527	,098	5,019	,000
		Dependent				

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Asosiasi di antara kedua variabel tersebut juga berlaku pada taraf nyata dengan nilai *phi* (0.000) lebih kecil dari *alpha* (0.05). Kekuatan asosiasi antara kedua variabel berada dalam tataran sedang dengan nilai asosiasi 0.637. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Palabuhanratu mayoritas tidak puas dengan kinerja koperasi yang ada saat ini, maupun sebelumnya.

Analisis statistik yang telah dijabarkan di atas telah menunjukkan tingginya tingkat individualitas komunitas. Hal ini ditunjukkan tidak adanya langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh komunitas dalam memperbaiki kinerja koperasi maupun perangkat desa, yang sebenarnya telah mereka sadari kelemahannya. Sikap mereka juga menyimpan sisi paradoks, di satu sisi mereka kecewa dengan kinerja koperasi dan perangkat desa, tapi di sisi lain, mereka tetap mencoba memperoleh keuntungan dari bantuan program yang disalurkan melalui kedua institusi tersebut.

Meskipun mayoritas responden kecewa dengan kinerja koperasi, mereka masih memiliki kepercayaan pada model koperasi. Penilaian negatif mereka hanya terletak pada aktor dan pelaksana kegiatan koperasi. Apabila kualitas pelayan koperasi ditingkatkan, mayoritas responden merasa yakin bahwa koperasi dapat memberikan kepuasan pada mereka. Keyakinan tersebut tercermin ketika responden ditawarkan alternatif model pengelolaan koperasi yang baru.

Tabel 4.14. Bantuan yang Diharapkan dari Koperasi

Bantuan	Frekuensi	Persentase
Modal	21	38,2
Simpan pinjam	12	21,8
Sembako	4	7,3
Perlengkapan nelayan	15	27,3
Lainnya	3	5,5
Total	55	100,0

Mayoritas responden berharap koperasi dapat memberikan bantuan berupa modal usaha. Responden yakin, warga memiliki kreatifitas masing-masing untuk mengelola modal tersebut dan kemudian mengembalikannya. Selama ini mereka merasa belum mendapat kesempatan bantuan seperti itu, sebab kredit bergulir yang menjadi strategi umum pemberdayaan di Palabuhanratu seringkali hanya diterima oleh para pemilik kapal besar (*taveuh besar*).

Pilihan responden pada bantuan modal menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan melalui dana bergulir yang selama ini diterapkan sudah tepat. Perbaikan program terletak pada pelaksanaan dilapangan, terutama dalam memberikan kesempatan pada nelayan buruh atau kelompok pesisir strata bawah lain untuk mendapatkan kesempatan memanfaatkan bantuan tersebut.

Tabel 4.15. Teknis Pengguliran Bantuan yang Diharapkan

Teknis Pengguliran	Frekuensi	Persentase
Skim a	7	12,7
Skim b	1	1,8
Skim c	3	5,5
Skim d*	18	32,7
Lainnya	17	30,9
Tidak mau pinjam	9	16,4
Total	55	100,0

Keterangan\* skim d adalah (skim1 Rp 2 juta, skim2 Rp 5 juta, dan skim3 Rp 10 juta).

Tabel di atas menunjukkan harapan warga pada guliran modal yang besar. Umumnya responden berpendapat bila pinjaman terlalu kecil, Rp 500.000 misalnya, tidak akan cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Pinjaman yang

terlalu kecil biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan konsumtif, seperti pemenuhan kebutuhan pokok.

Tabel 4.16. Cara Penyaluran Modal yang Diharapkan

Cara Penyaluran	Frekuensi	Persentase
Tidak tahu	1	1,8
Cara a*	18	32,7
Cara c	16	29,1
Cara d	15	27,3
Lainnya	5	9,1
Total	55	100,0

Keterangan: \*modal di gulirkan di kantor koperasi, pengembalian juga dilakukan di kantor koperasi.

Bila koperasi ingin memberikan kredit bergulir, cara penyaluran yang menjadi pilihan yang paling diminati adalah calon peminjam mendatangi koperasi untuk meminjam dan mengembalikan pinjamannya. Cara ini cukup konsisten dengan strategi penyaluran kredit bergulir yang sudah berjalan di Palabuhanratu. Meski demikian, pilihan-pilihan lain juga cukup banyak dipilih. Cara kedua adalah peminjaman dilakukan di koperasi, tetapi pengembaliannya dilakukan di rumah para peminjam. Cara pengembalian seperti ini mirip dengan pola simpan-pinjam bank keliling.

Bank keliling adalah sebutan warga Desa Palabuhanratu untuk simpan-pinjam melalui rentenir. Biasanya bank keliling bisa memberikan pinjaman antara Rp100.000 hingga Rp300.000, dengan pengembalian harian Rp1.000 hingga Rp.3000 rupiah. Para rentenir mempekerjakan orang yang akan berkeliling desa menagih atau meminjamkan uang pada warga desa.

Tabel 4.17. Aktor Pengelola Koperasi

Pengelola Koperasi	Frekuensi	Persentase
Tidak Tahu	3	5,5
Pemerintah	15	27,3
Profesional	7	12,7
Warga	3	5,5
Kerjasama Pemerintah/ Profesiona-Warga	27	49,1
Total	55	100,0

Tabel di atas menunjukkan harapan responden mengenai siapa yang akan mengelola koperasi tersebut. Dapat dilihat mayoritas warga berharap bisa berkolaborasi dengan pemerintah atau profesional dalam mengelola koperasi. Kalaupun mereka tidak dilibatkan, mereka berharap jajaran pemerintahlah yang akan mengelola koperasi tersebut. Harapan-harapan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran responden bila koperasi dikelola oleh pihak lain, akan terjadi penyelewengan seperti yang sudah-sudah.

Bila semua harapan-harapan pada model koperasi yang baru tersebut bisa diwujudkan, mereka percaya koperasi yang baru ini bisa membantu mereka. Persepsi optimis dari responden tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini, dimana mayoritas responden akan merasa puas pada koperasi yang baru bila harapan mereka terpenuhi.

Tabel 4.18. Optimisme pada Koperasi Baru

Optimisme	Frekuensi	Persentase
Tidak yakin	9	16.4
Biasa saja	9	16.4
Puas	37	67.3
Total	55	100.0

Perubahan sikap atas keyakinan pada koperasi baru, dibandingkan dengan koperasi lama maupun program bantuan lain dari pemerintah terbukti secara statistik. Di antara ketiga variabel tersebut terdapat perbedaan rata-rata, seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.19. Uji Friedman terhadap Optimisme pada Koperasi, Pendapat tentang Koperasi, dan Pendapat tentang Program

	Mean Rank
Optimisme pada Koperasi	1,97
Pendapat tentang koperasi	1,72
Pendapat tentang program	2,31

**Test Statistics(a)**

N	55
Chi-Square	11,617
df	2
Asymp. Sig.	,003

a. Friedman Test

Akan tetapi, pendapat responden tersebut tidak mewakili populasi. Hasil uji *friedman* menunjukkan adanya nilai *chi square* yang tinggi. Pendapat tersebut hanya mewakili sampel, tidak sampai pada tingkat populasi. Dengan demikian, optimisme pada koperasi yang baru hanya menjadi pendapat dari responden saja, tidak mewakili seluruh komunitas pesisir di Desa Palabuhanratu.

Hasil temuan lapangan yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa partisipasi komunitas pada berbagai program pemberdayaan yang telah berjalan di Kecamatan Palabuhanratu belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan komunitas. Menurut McArdle, proses pemberdayaan harus mampu mengakumulasi pengetahuan, keterampilan, serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan komunitas tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Akan tetapi, bila melihat pelaksanaan pemberdayaan di Palabuhanratu, ternyata proses tersebut menghadapi hambatan struktural dan kultural.

Hambatan struktural yang dimaksud berangkat dari kelirunya pemahaman atas proses pemberdayaan. Partisipasi warga yang dimaksud dalam pemberdayaan dari koperasi maupun perangkat desa hanya sebatas keikutsertaan warga saja. Sehingga, partisipasi tersebut sebenarnya lebih tepat disebut dengan mobilisasi.

Dan para penggerak program tersebut juga tampaknya mengambil keuntungan dengan pola seperti itu.

Hambatan kultural yang dimaksud adalah sikap individualistik dari komunitas pesisir sendiri. Mereka kurang cakap dalam bekerjasama. Ini terlihat dari kepedulian mereka pada program pemberdayaan itu sendiri. Mereka pasrah saja pada kenyataan bahwa para penggerak program pemberdayaan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

#### **4.4 Pilihan Komunitas atas Model Koperasi dan Model Perusahaan**

##### **4.4.1 Perbandingan Harapan : Koperasi atau Perusahaan**

Berdasarkan hasil analisis AHP, alternatif model koperasi memiliki skor preferensi yang lebih baik ketimbang model inti-plasma dan model pusat komunitas. Hasil analisis tersebut kemudian diuji kembali dengan metode survei. Akan tetapi, alternatif model pusat komunitas tidak lagi dimasukkan sebagai variabel model pemberdayaan karena relevansinya yang lemah untuk diterapkan di Kecamatan Palabuhanratu.

Berdasarkan indikator-indikator dari kedua variabel, ternyata responden memiliki harapan yang lebih besar pada model Koperasi, ketimbang model perusahaan induk. Tabel di bawah ini menunjukkan skor total indikator-indikator Koperasi yang lebih baik ketimbang skor total indikator-indikator perusahaan. Begitu pula dengan rata-ratanya.

Tabel 4.20. Skor Maksimum dan Rata-Rata Indikator Variabel Koperasi dan Variabel Perusahaan

Indikator Koperasi	Skor	Rata-Rata	Indikator Perusahaan	Skor	Rata-Rata
Kredit Modal Bergulir	341	4.06	Pengusaha Mampu Mengembangkan Bisnis	331	3.94
Skim Peminjaman	294	3.5	Pengusaha Bekerjasama Langsung dengan Warga	322	3.83
Dijalankan Pemerintah dan Warga	312	3.71	Berkelompok Untung Lebih	304	3.62
Penyaluran dan Pengembalian	319	3.8	Warga Berhak atas Keuntungan Perusahaan	327	3.89
Kesempatan Warga Sama	336	4	Prospek Perusahaan Cerah	308	3.67
<b>Total</b>	<b>1602</b>	<b>19.07</b>	<b>Total</b>	<b>1592</b>	<b>18.95</b>

Berdasarkan data di atas, mayoritas responden ternyata lebih berharap pada koperasi sebagai alternatif model pemberdayaan. Responden memiliki harapan yang tinggi pada strategi pemberdayaan ekonomi melalui dana bergulir. Meski demikian, harapan-harapan tersebut akan terpenuhi apabila koperasi mampu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga agar dapat memanfaatkan bantuan yang diselenggarakan oleh koperasi. Kedua indikator inilah yang memiliki skor harapan lebih tinggi dibandingkan indikator-indikator lain pada variabel koperasi.

Selisih skor antara model koperasi dengan model perusahaan sebenarnya tidak terlalu besar. Akan tetapi, responden umumnya menanggapi biasa-biasa saja pada setiap indikator yang mendukung model ini. Pelaksanaan model melalui pembentukan kelompok nelayan dan masa depan perusahaan bahkan mendapatkan skor yang lebih rendah dibandingkan dengan indikator-indikator lain. Berdasarkan keterangan responden dalam wawancara tatap muka, nelayan-nelayan di Palabuhanratu lebih suka bekerja sendiri ketimbang berkelompok. Sebab, kepercayaan diantara mereka tidak begitu tinggi.

Hasil survei ini mendukung kesimpulan dari analisis AHP yang melibatkan responden kalangan elit kecamatan maupun kabupaten. Akan tetapi, bila dilihat dari segi kelas sosial, ternyata responden yang berada pada strata sosial bawah, lebih memilih perusahaan ketimbang koperasi.



Variabel status sosial diperoleh menggabungkan indikator-indikatornya, yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan kepemilikan, menjadi variabel status sosial. Variabel ini kemudian dibagi kedalam lima kelas yang berbeda.

Tabel 4.21. Status Sosial Ekonomi

Status Sosial Ekonomi	Jumlah	(%)	Persen Kumulatif
Sangat rendah	8	9.5	9.5
Rendah	19	22.6	32.1
Sedang	20	23.8	56.0
Tinggi	17	20.2	76.2
Sangat tinggi	20	23.8	100.0
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>100.0</b>	

Responden yang status sosialnya tergolong rendah dan sangat rendah berjumlah 32,1% dari total responden. Kedua kelompok ini memiliki pilihan model pemberdayaan yang berbeda dari keseluruhan responden. Dengan cara penghitungan yang sama, ternyata model perusahaan lebih diinginkan oleh responden yang tingkat status sosial ekonominya rendah dan sangat rendah, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.22. Skor Maksimum dan Rata-Rata Indikator Variabel Koperasi dan Variabel Perusahaan Pada Responden Strata Bawah

Indikator Koperasi	Skor	Rata-Rata	Indikator Perusahaan	Skor	Rata-Rata
Kredit Modal Bergulir	109	4.04	Pengusaha Mampu Mengembangkan Bisnis	108	4
Skim Peminjaman	90	3.33	Pengusaha Bekerjasama Langsung dengan Warga	107	3.96
Dijalankan Pemerintah dan Warga	100	3.70	Berkelompok Untung Lebih	98	3.63
Penyaluran dan Pengembalian	102	3.78	Warga Berhak atas Keuntungan Perusahaan	103	3.81
Kesempatan Warga Sama	107	3.96	Prospek Perusahaan Cerah	102	3.78
<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>18.81</b>	<b>Total</b>	<b>518</b>	<b>19.19</b>

Perbedaan pendapat antara responden yang kelas sosialnya berada di tingkat rendah kebawah dengan responden secara keseluruhan menunjukkan adanya perbedaan persepsi diantara kelompok-kelompok responden tersebut. Ketika diberikan penjelasan bahwa perusahaan ini nantinya akan membeli hasil tangkap ikan langsung kepada nelayan, tanpa perantara pedagang, responden umumnya setuju. Meski demikian, skor usaha berkelompok masih mendapat nilai yang paling rendah. Hasil penghitungan ini tentu harus menjadi catatan bila rencana pengembangan model ini akan dilaksanakan.

Penggabungan indikator-indikator menjadi variabel koperasi dan variabel perusahaan juga tidak merubah hasil perbandingan antar dua model pemberdayaan tersebut. Berdasarkan hasil *compute*, persentase harapan tinggi pada model koperasi tetap lebih besar dibandingkan dengan harapan pada model perusahaan.

Tabel 4.23. Tingkat Harapan Pada Koperasi dan Tingkat Harapan Pada Perusahaan

Harapan Pada Koperasi			Harapan Pada Perusahaan		
Harapan	(%)	Persen Kumulatif	Harapan	(%)	Persen Kumulatif
Rendah	32.1	32.1	Rendah	26.2	26.2
Sedang	13.1	45.2	Sedang	21.4	47.6
Tinggi	54.8	100	Tinggi	52.4	100
Total	100		Total	100	

Model pemberdayaan di pilih berdasarkan kondisi-kondisi yang dihadapi di lapangan. Selain itu, kesuksesan model pemberdayaan juga memiliki hubungan dengan harapan-harapan komunitas atas bagaimana model tersebut berjalan. Berdasarkan skor dari setiap indikator model, dapat dilihat bahwa model koperasi menjadi model yang memiliki skor lebih tinggi. Akan tetapi, terdapat kecenderungan bahwa warga lebih melihat hasil atau manfaat yang bisa diperoleh dari program, ketimbang proses bekerjanya model tersebut. Sementara pada model perusahaan, harapan-harapan akan manfaat ekonomi cukup menonjol. Dalam upaya memahami apa sebenarnya yang menentukan keberhasilan model tersebut, maka hubungan dan kekuatan hubungan antara model dengan kriteria model perlu di perhatikan.

Indikator-indikator kriteria model dikelompokkan kedalam dua variabel, efektifitas model dan penerimaan model. Efektifitas model terdiri dari pernyataan model membantu pemasaran dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Sementara penerimaan model terdiri dari pernyataan kesesuaian model dengan permintaan masyarakat dan kesesuaian model dengan adat dan kebiasaan warga.

Berdasarkan analisis regresi, dapat diketahui bahwa masing-masing model pemberdayaan memiliki kekuatan hubungan yang lemah atas kriteria penerimaan model dan kriteria efektifitas model.

Tabel 4. 24. Uji Regresi Harapan pada Perusahaan dengan Harapan Efektivitas Model dan Harapan Penerimaan Model

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.318(a)	0.101	0.079	0.81751

a Predictors: (Constant), Harapan Efektifitas Model, Harapan Penerimaan Model

ANOVA(b)						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.104	2	3.052	4.567	.013(a)
	Residual	54.134	81	0.668		
	Total	60.238	83			

a Predictors: (Constant), Harapan Efektifitas Model, Harapan Penerimaan Model  
b Dependent Variable: Harapan Pada Perusahaan

Coefficients(a)						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.096	0.458		2.392	0.019
	Harapan Penerimaan Model	0.146	0.193	0.08	0.758	0.451
	Harapan Efektifitas Model	0.551	0.189	0.307	2.911	0.005

a Dependent Variable: Harapan Pada Perusahaan

Model hubungan antara kriteria efektifitas, kriteria akseptabilitas dan model perusahaan dapat diterima secara statistik. Akan tetapi, kekuatan

hubungannya lemah, dan hanya mampu menjelaskan sekitar 31,8% dari harapan pada koperasi.

Dalam analisis koefisien regresi, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel model perusahaan dengan kriteria efektifitas lebih kuat dari kriteria penerimaan. Ini menunjukkan bahwa model ini memang memiliki potensi yang lebih baik dalam mendukung perekonomian komunitas, meskipun belum tentu diterima secara baik.

Hasil yang berbeda diperoleh ketika menganalisis model koperasi. Kedua variabel kriteria ternyata tidak memiliki hubungan yang terbukti secara statistik. Peneliti kemudian melakukan perubahan, yaitu dengan menggabungkan seluruh indikator kriteria untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel kriteria dengan variabel model.

Tabel 4. 25. Uji Regresi Harapan pada Koperasi dengan Kriteria

Model Summary						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	.212(a)	0.045	0.033	0.89463		

a Predictors: (Constant), kriteria

ANOVA(b)						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.073	1	3.073	3.84	.053(a)
	Residual	65.629	82	0.8		
	Total	68.702	83			

a Predictors: (Constant), kriteria  
b Dependent Variable: Harapan Pada Koperasi

Coefficients(a)						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.306	0.985		0.31	0.757
	kriteria	0.123	0.063	0.212	1.96	0.053

a Dependent Variable: Harapan Pada Koperasi

Berdasarkan uji regresi, variabel kriteria memang memiliki hubungan yang terbukti secara statistik. Akan tetapi, hubungan antar kedua variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 21,2% persen dari harapan pada koperasi.

#### 4.5 Rekomendasi Program

Hasil analisis AHP menempatkan model koperasi sebagai model yang memiliki tingkat penerimaan lebih baik ketimbang model inti-plasma dan model pusat komunitas. Akan tetapi, berdasarkan survei uji preferensi model pemberdayaan, terdapat kekecewaan warga pada program-program bantuan ataupun pelayanan dari lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemberdayaan. Berdasarkan temuan tersebut, model pusat komunitas yang basis kerjanya terletak pada saluran aspirasi warga melalui institusi lokal dan perangkat desa, menjadi tidak relevan diterapkan di Palabuhanratu.

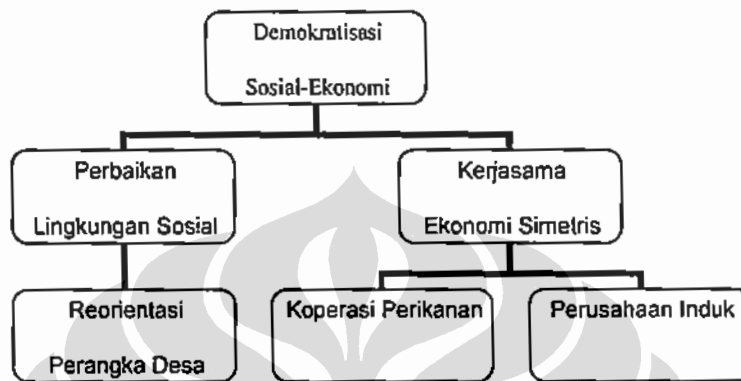
Survei kedua dijalankan untuk menguji harapan warga pada model koperasi dan model perusahaan –yang merupakan penyesuaian gagasan inti-plasma dalam proposal penelitian. Hasilnya model koperasi memiliki skor yang lebih tinggi dari model perusahaan. Akan tetapi, hanya model perusahaan terbukti secara statistik berlaku di populasi memiliki hubungan dengan kriteria-kriteria model. Sebaliknya model koperasi tidak terbukti dengan langsung.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, baik model koperasi maupun model perusahaan memiliki relevansi untuk diterapkan di Palabuhanratu. Akan tetapi, penerapannya membutuhkan penyesuaian agar dapat berjalan dengan baik. Sebab skor rata-rata kedua model tersebut berada diantara kategori biasa saja dan tinggi.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, perbaikan kondisi kehidupan sosial ekonomi komunitas pesisir dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut ditujukan untuk menciptakan sebuah lingkungan sosial ekonomi yang demokratis. *Pertama*, adalah pendekatan sosial. Melalui pendekatan ini, kehidupan kewargaan komunitas pesisir Palabuhanratu ditata dengan baik. Salah satu metode yang paling efektif adalah dengan memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dan institusi lokal. Perbaikan tersebut harus dimulai dari reorientasi perangkat desa.

Perangkat desa diharapkan bisa menjadi pusat komunitas yang memperkuat posisi tawar warga. Selama ini, peran perangkat desa belum

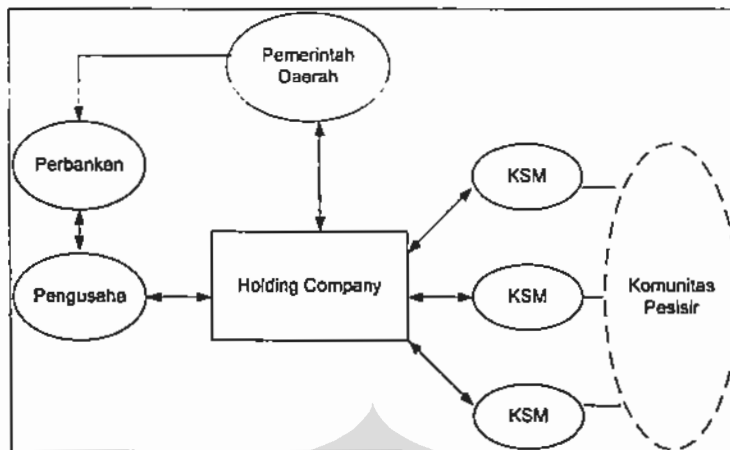
dirasakan oleh komunitas pesisir strata bawah. Mereka lebih dipandang sebagai aktor-aktor oportunistis yang seringkali mengatasnamakan warga untuk kepentingan pribadi. Reorientasi perangkat desa diharapkan bisa kembali meningkatkan kepercayaan warga kepada perangkat desa.



Gambar 4.22. Kerangka Perbaikan Lingkungan Sosial-Ekonomi Kec. Palabuhanratu

*Kedua*, adalah pendekatan ekonomi. Penelitian ini menawarkan dua alternatif model yang bisa diterapkan di Kecamatan Palabuhanratu. Model pertama adalah koperasi. Keberadaan koperasi perikanan bisa membantu menguatkan permodalan warga. Dengan tertutupnya akses perbankan bagi komunitas pesisir strata bawah, kredit modal bergulir dari koperasi diharapkan bisa membantu warga. Akan tetapi, agar penyalurannya bisa maksimal, keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan operasionalisasi kerja koperasi menjadi salah satu faktor yang menentukan. Sebab, hanya dengan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan koperasi, kepercayaan komunitas akan kemampuan koperasi memberikan kesempatan yang sama bagi warga untuk memanfaatkan keberadaan koperasi bisa tumbuh.

Alternatif kedua harus berangkat dari inisiatif pemerintah daerah. Pemerintah daerah berinisiatif untuk membangun kemitraan antara pemerintah sendiri, pengusaha, serta komunitas lokal untuk memajukan sektor perikanan di Palabuhanratu dengan adil.



Gambar 4.23. Model Kemitraan Negara-Swasta-Komunitas dalam Konteks Pemberdayaan Komunitas Pesisir

Kemitraan antara negara-swasta-komunitas bisa di bangun dalam sebuah wadah organisasi yang berfungsi sebagai *holding company*. Wadah tersebut berupa unit bisnis yang akan menaungi usaha-usaha yang dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Mandiri (KSM) dari komunitas pesisir. Kelemahan manajemen bisnis dan keterbatasan akses pasar dari KSM bisa di siasati oleh pengusaha yang berperan sebagai manajer dalam *holding company* atau perusahaan induk.

Pemerintah daerah, mewakili negara, berperan sebagai fasilitator serta penggagas awal yang mampu mengumpulkan pengusaha dan komunitas kedalam perusahaan induk tersebut. Agar pengusaha tertarik untuk berinvestasi dalam sektor perikanan dan kelautan, pemerintah perlu melibatkan perbankan, untuk memberikan fasilitas modal yang akan dikelola oleh pengusaha melalui perusahaan induk. Nantinya, pengusaha tersebut mengelola modal yang di jaminkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas KSM-KSM dalam berproduksi.

Keuntungan maupun resiko dari aktifitas ekonomi tersebut nantinya akan ditanggung bersama. Ketika keuntungan telah diperoleh, pembagiannyapun akan dilakukan secara merata, sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, komunitas pesisir, melalui KSM-KSM harus mendapatkan hak kepemilikan atas perusahaan

induk tersebut. Dengan demikian, komunitas berpeluang memperoleh keuntungan ganda, yaitu keuntungan dari usaha mereka sendiri, dan bagi hasil dari keuntungan perusahaan induk.

Konsep seperti ini menekankan pada pemberian asset yang sesungguhnya kepada kelompok marjinal. Nelayan tidak lagi diberikan pinjaman modal mikro untuk kemudian diputar sebagai bagian dari modal usaha. Melainkan, mereka diberikan haknya atas asset yang selama ini telah dikelola mereka secara mandiri selama bertahun-tahun, yaitu modal sosial dan pengolahan potensi wilayah dengan pembagian keuntungan yang lebih adil.

Tantangan dalam membangun sebuah model perusahaan induk adalah resistensi yang datang dari para pemilik modal. Sebab, dengan beroperasinya perusahaan induk, kemungkinan besar para nelayan tidak perlu lagi meminjam modal dari pengusaha lokal. Mereka bisa mendapatkan fasilitas dari perusahaan. Harga jual ikan juga tidak lagi ditentukan oleh pengusaha, sebab nelayan bisa langsung menjual hasil tangkapnya ke perusahaan.

Posisi para pengusaha lokal harus dipikirkan dalam setiap model pemberdayaan. Sebab, dalam kenyataan lapangan, pemilik modal inilah yang memiliki peran paling strategis dalam sektor perikanan di Palabuhanratu, dan mungkin di seluruh daerah pesisir Indonesia. Sebagai gambaran, PT AGB Palabuhanratu yang notabene didukung oleh fasilitas infrastruktur memadai, kekuatan modal dan dukungan pemerintah lokal saja tidak bisa membeli ikan langsung ke nelayan, melainkan melalui pengusaha lokal.

Para pemilik modal ini harus diposisikan dengan tepat. Sebaiknya mereka tidak ditempatkan pada posisi koordinator Kelompok Swadaya Mandiri. Sebab, bila mereka ditempatkan disana, justru akan mengurangi kesempatan bagi nelayan atau komunitas pesisir strata bawah lain untuk memperoleh keuntungan. Para pengusaha lokal bisa menjadi bagian dari manajemen perusahaan.



Tabel 4.26. Matriks Rencana Kerja

Strategi	Deskripsi	Prioritas	Penanggung jawab
Perbaikan Lingkungan Sosial 1. Reorientasi Perangkat Desa	Memaksimalkan fungsi perangkat desa, terutama ketua RT dan RW sebagai penyalur aspirasi warga. Pergantian pengurus juga dimungkinkan bila kinerja pihak yang bersangkutan tidak memuaskan	3	1. Pemerintah Kecamatan 2. Organisasi kemasyarakatan 3. warga
Kerjasama Ekonomi Simetris 1. Koperasi Perikanan 2. Perusahaan Induk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan fungsi koperasi perikanan yang sudah ada dengan menyesuaikan kondisi kontemporer dengan harapan-harapan warga</li> <li>• Membangun sebuah unit bisnis perikanan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, serta komunitas dalam posisi yang relatif setara</li> </ul>	1 2	1. Pemerintah Kecamatan 2. Dinas Perikanan Kabupaten 3. Pengurus Koperasi 4. HNSI 5. Kelompok Nelayan 6. Perbankan 7. Pengusaha Lokal/Domestik/Mancanegara